

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI
PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU

OLEH**MUTHIA RAHMATUL HUSNA****11521201591****PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU-PEKANBARU****1440 H/ 2019 M**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

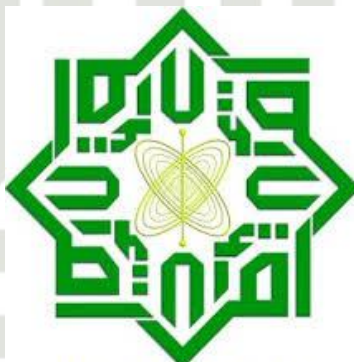
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI
PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Skripsi diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MUTHIA RAHMATUL HUSNA

11521201591

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1440 H/ 2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **"IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"** yang ditulis oleh :

Nama : MUTHIA RAHMATUL HUSNA
NIM : 11521201591
Program Studi: HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Jum'at, 27 September 2019
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji 1
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 2
Ade Fariz Fakhrrullah, M. Ag



.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru, 14 Mei 2019

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. MUTHIA RAHMATUL HUSNA

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah
 dan Ilmu Hukum
 Di-
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang berjudul **"IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"** yang ditulis oleh Sdr. **Muthia Rahmatul Husna** telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat Sdr. **Muthia Rahmatul Husna** tersebut dapat dipanggil dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Demikianlah harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam
 Pembimbing

Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA
 19740704200604 1003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muthia Rahmatul Husna (2019): Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau Menurut Hukum Islam

Izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi masyarakat adat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang berkaitan dengan perkawinan. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah proses meminta izin secara tertulis kepada *niniak mamak* yang merupakan suatu kewajiban bagi *anak kemenakan* yang hendak menikah ini kemudian terasa menyulitkan bagi *anak kemenakan* di Nagari tersebut. Selain itu, tidak adanya *nash* dalam Al-qur'an maupun hadits serta tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia terkait dengan izin *niniak mamak* ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai mekanisme izin tertulis *niniak mamak* dalam Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu dan bagaimana tinjauan hukum islam dalam hal ini *'urf* dan *maslahah mursalah* terkait izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan ini.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Populasi dari penelitian ini ialah pemerintah nagari, *niniak mamak*, dan masyarakat nagari yang menikah pada tahun 2018 dengan total keseluruhan berjumlah 114 orang. Sampel diambil dari populasi secara acak. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan secara detail mengenai subjek dan objek penelitian untuk selanjutnya teori dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh.. Teknik penulisan menggunakan metode *deduktif* melakukan pendekatan analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diolah dan menghasilkan data yang bersifat khusus (kesimpulan).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau menurut Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan mengingat lebih banyaknya *maslahah* yang ditimbulkan dibanding dengan *mudharat*-nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IZIN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Susk Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan hasil jerih payah Beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do'a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Ermi Yenti yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku rektor UIN Suska Riau,
3. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau,
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini,
5. Kepada Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan,
6. Kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku pembimbing skripsi dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis,
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau,
8. Keluarga besar tercinta, Adinda Hasnan Habib, Fauzil Hamdi, Tante Gusniwati dan keluarga terima kasih karena telah memberikan bantuan, dukungan, semangat dan do'a demi kelancaran perkuliahan ini,
9. Kepada Keluarga Besar Keluarga Rang Pakan Sinayan (KRAP) di seluruh Indonesia yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dan do'a sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan,
10. Sahabat-sahabat Nurul Fauza, Nurma Sriyatun, Mutiah Syahidah, Zulhamri dan Teti Nur Aini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sahabat seperjuangan, AH. C terima kasih atas segala dukungan, bantuan, motivasi dan semangat serta kenangan yang diberikan selama perkuliahan hingga selesainya karya ilmiah ini,
12. Sahabat seperjuangan, AH. A, AH. B serta teman-teman seangkatan yang selalu memberikan semangat dan motivasinya,
13. Kepada Bapak H. HS. DT. Kayo Nan Kuniang, S.Ag selaku Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, *Niniak Mamak* Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu dan masyarakat Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu terima kasih telah memberikan masukan dan arahan serta mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu,
14. Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagi pemikiran dan dorongan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian dan karya ini tepat waktu.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna, aaammiinn...

Pekanbaru, 30 September 2019

Penulis,

MUTHIA RAHMATUL HUSNA

NIM : 11521201591

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	A
DAFTAR TABEL.....	I
BABIPENDAHULUAN.....	I
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	16
1.3 Rumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1.5 Metode Penehtian	18
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB 11GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
2.1 Sejarah Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	24
2.2 Visi dan Misi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.....	30
2.2.1 Visi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	30
2.2.2 Misi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	32
23 Kondisi Sosial.....	32

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	32
2.3.2 Saran Kesehatan	33
2.3.3 Agama	34
2.4 Gambaran Kependudukan	36
2.4.1 Jumlah Penduduk	36
2.4.2 Jumlah Penduduk Per Jorong	36
2.4.3 Jumlah Warga Negeri Berdasarkan Jenis Usia,	37
BAB III TINJAUAN TEORITIS	38
3.1 Syarat Perkawinan	38
3.1.1 Pengertian Perkawinan	38
3.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	42
3.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan dalam, Islam	45
3.1.4 Syarat Sah Perkawinan di Indonesia	47
3.1.5 Pencatatan Perkawinan di Indonesia	55
3.2 Izin Perkawinan dalam Islam	61
3.2.1 Izin Wali	61
3.2.2 Izin Calon Mempelai	63
3.3 Al- 'Urf	67

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.1	Pengertian <i>Al-'Urf</i>	67
3.3.2	Dalil Kehujjahan <i>Al-'Urf</i>	69
3.3.3	Pendapat Ulama Tentang ' <i>Al-'Urf</i>	70
3.4	<i>Maslahah Mursalah</i>	73
3.4.1	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	73
3.4.2	Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	76
BAB IV HASIL PENELITIAN		77
4.1	Mekanisme Wn Tertulis Ninik Mamak Sebagai Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pak-an Sinayan Kecamatan Banuhampu	77
4.1.1	Sejarah Lahirnya Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Administrasi Pencatatan. Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	77
4.1.2	Tttivan Adanya Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	79
4.1.3	Mekanisme Wn Tertulis Ninik Mamak Sebagai Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagwi Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	81
4.1.4	Faktor Penyebab Terhalangnya Izin <i>Niniak Mamak</i>	84
4.1.5	Pandangan Masyarakat Mengenai Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Administrasi Pencatatan Perkawman di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	87



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

4.2 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu	89
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR BACAAN	99
LAMPIRAN	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

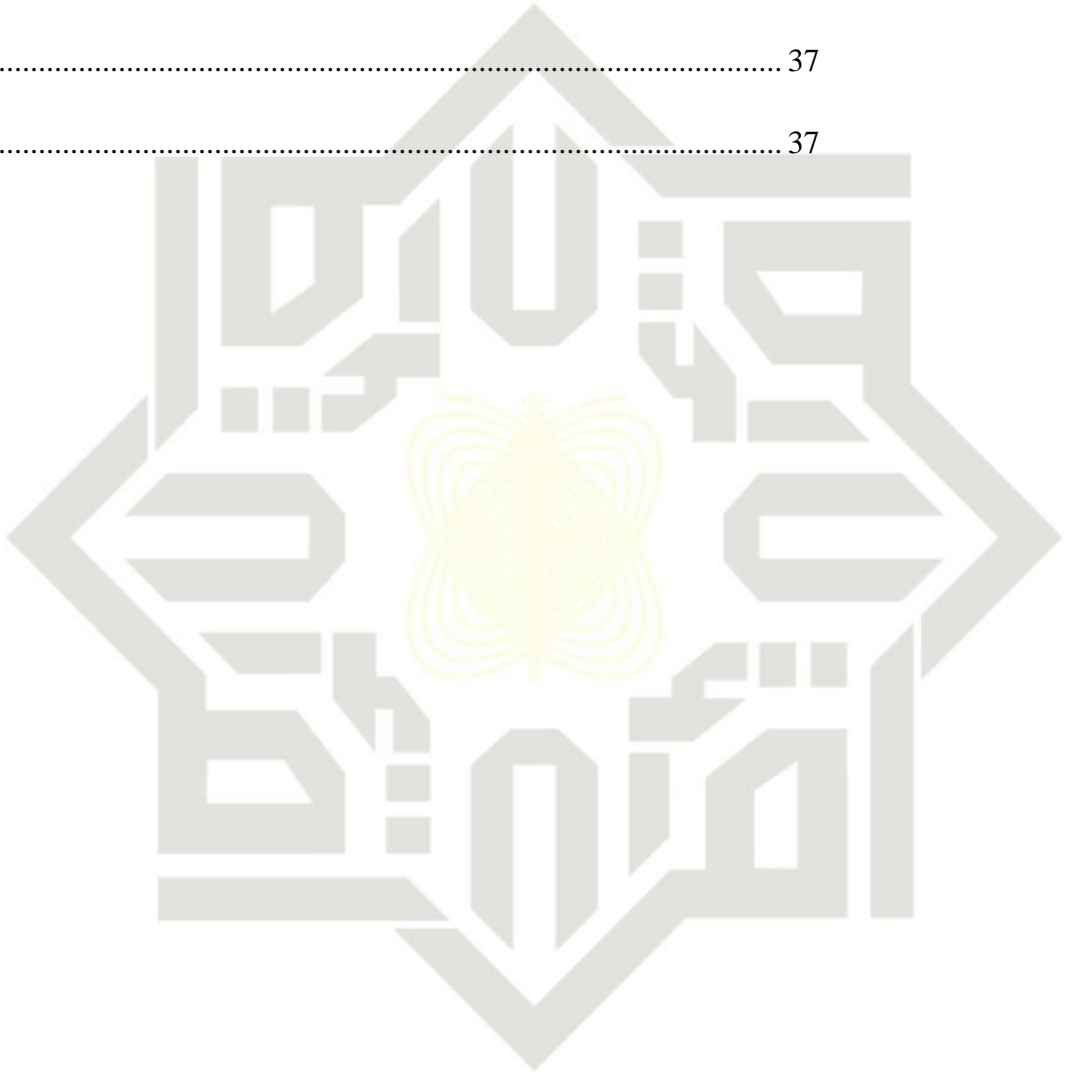
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	29
Tabel II.2	33
Tabel II.3	35
Tabel II.4	37
Tabel II.5	37



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perbuatan yang disyariatkan islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab *al-jam'u*² dan *al-dhamu*³ yang berarti kumpul. Makna nikah juga bisa diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Kata nikah juga berasal dari kata *nikahun*⁴ yang merupakan masdar dari “*nakaha*”, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h., 6.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h., 208.

³ *Ibid*, h., 828.

⁴ *Ibid*, h., 1461.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁵

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia sendiri “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin umum digunakan untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan kata nikah hanya digunakan untuk manusia.⁷

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 7. Lihat Juga: Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h., 11. Lihat Juga: Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, (Pa’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14, No. 2, 2016), h., 186.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet: 56, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h., 374.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc. Cit*.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, Bab I Pasal I UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. 30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h., 537. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah Riwayat Nabi SAW bersabda:

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁹“Nabi saw. bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.” (Bukhari, Muslim).

Hadist di atas menyuruh para pemuda untuk menikah atau berpuasa jika merasa belum mampu untuk menikah. Dalam hadist lain juga dijelaskan mengenai kewajiban menikah ini.

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا؛ وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر؛ وقال آخر:

أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؛ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له،

pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h., 522. Lihat juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h., 51.

⁹ Muhammad Fu'ad Adbu Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan (Koleksi Hadits Yang Disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)*, Hadits Riwayat Bukhari, no. 69, Kitab Nikah, Bab 2, (Semarang : al-Ridha, 1414 H), h., 206 Hadits No. 884 Lihat : Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj, Jil. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h., 162-163. Lihat juga: Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan an-Nasa'I*, terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h., 647-648. Lihat juga: Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, Hadits Nomor 826, *Op. Cit*, h., 190.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ١ باب الترغيب في النكاح

“Anas bin Malik r.a. berkata: Datang tiga orang ke rumah isteri Nabi saw. untuk menanyakan ibadah Nabi saw. kemudian sesudah diberitahu mereka anggap sedikit, tetapi mereka lalu berkata: Di manakah kami jika dibanding dengan Nabi saw. yang telah diamapuni semua dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu yang satu berkata: Saya akan bangun semalam suntuk salat untuk selamanya. Yang kedua berkata: Aku akan puasa selama hidup dan tidak akan berhenti. Ketiga berkata: Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin untuk selamanya.

Kemudian datang Nabi saw. bertanya kepada mereka: Kalian telah berkata begini, begitu; Ingatlah demi Allah akulah yang lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan lebih taqwa kepada Allah, tetapi aku puasa dan berbuka (tidak puasa), salat malam dan tidur, dan kawin dengan wanita, maka siapa tidak suka kepada sunnahku, bukan dari ummatku.” (Bukhari, Muslim).¹⁰

Hadist tersebut kemudian dipahami oleh sebagian fuqaha seperti dari Mazhab Zhahiri¹¹ sebagai dasar hukum atas kewajiban untuk melaksanakan

¹⁰ Muhammad Fu'ad Adbu Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, Hadits No. 885, Hadits Riwayat Bukhari, no. 67, Kitab Nikah, Bab 2, h., 207-298. Lihat Juga: Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, Hadits Nomor 827. Cet, 1, Terj. (Bandung: Marja, 2018), h., 190.

¹¹ Mazhab Zhahiri (*Arab*: ظاهرية; Literal) adalah salah satu mazhab fikih dan akidah dalam lingkup *ahlus sunnah* yang mencapai masa jayanya semenjak abad ke-3 hingga ke-8 H. Pengikut mazhab ini mengimani secara harfiah ayat-ayat Al-Quran dan Hadits sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Keyakinan mazhab ini menolak adanya permisalan (*Oiyas*) dan pemikiran pribadi (*Ra'y*) sebagai bagian dari sumber hukum fikih. Selain itu juga tidak menganggap fungsi konsesus (*Ijma'*). Dalam bidang akidah, keyakinan mazhab ini hanya menyifati Allah menurut dengan apa yang ada dan tertulis jelas dalam Al-Qur-an saja dan menolak dengan keras praktik *antropomorfisme* (Penyerupaan /*Tasbih*). Praktik pendekatan tradisi Islam ini diperkirakan dimulai di Irak pada abad ke-9 M (ke-3 H) oleh *Dawud bin Khalaf* (w. 883 M). Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Zhahiri diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 20.14 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Sedangkan menurut *fuqaha* lainnya seperti Imam Malik¹² berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, mubah untuk sebagian yang lainnya dan haram untuk sebagian yang lainnya lagi. Hal ini tergantung kepada niat dan tingkat *masalah* dari perkawinan tersebut.¹³

Dalam Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.¹⁴

Rukun yang hakiki dalam pernikahan ialah ridha dari kedua belah pihak serta adanya keinginan keduanya untuk mengikat tali pernikahan. Meski demikian, para *fuqaha* berpendapat bahwa rukun dari pernikahan ialah adanya

¹² Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapannya: *Malik bin Anas bin Malik bin 'Āmr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), ([Bahasa Arab](#): مالك بن أنس), lahir di ([Madinah](#)) pada tahun 714M / 93H) dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau merupakan pakar ilmu [fikih](#) dan [hadis](#). Beliau juga merupakan pendiri [Mazhab Maliki](#). Lihat: Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Terj, Cet. 7, (Jakarta: Amzah, 2013), h., 71 dan 178.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 11. Lihat juga : Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jil. 2 Terj, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h., 394-395.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 79. Lihat Juga: Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014), h. 291.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijab dan *qabul*.¹⁵ Pernyataan keridhaan dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan ridha dan persetujuan dari pihak laki-laki disebut *qabul*.

Syarat sah dari pernikahan ada lima, *pertama* yaitu adanya calon suami di mana calon suami tersebut bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci) dan tidak sedang ihram haji.

Kedua, adanya calon istri yang tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji.

Ketiga, harus ada wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu, laki-laki dewasa yang waras akalnyanya dan tidak dipaksa, adil serta tiding sedang dalam ihram haji.

Keempat yaitu *Ijab qabul*. *Ijab* adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *qabul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Kelima yaitu adanya dua orang saksi laki-laki yang hadir dalam prosesi *ijab qabul* dan mengerti maksud dari akad tersebut.

Terakhir, yaitu mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1, Terj, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), h., 412.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya mengenai rukun pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi serta ada shighat *ijab qabul*.¹⁷

Pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.¹⁸

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹

Faedah terbesar dari perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah serta memelihara keturunan. Nikah juga dipandang sebagai *kemaslahatan* umum untuk menjaga ketertiban umum

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* Lihat juga: Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h., 55.

¹⁷ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Op. Cit.* h., 412.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990), h., 11.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit.* Lihat Juga: Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Sirri*, (Isti'dal: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No.1, 2014), h., 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melampiaskan *syahwat* kepada yang halal.²⁰ Dari sini kita tahu bahwa banyak sekali *maslahat* yang menjadi *maqashid syari'ah* dari kewajiban menikah ini.

Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian umat manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam di antaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S Al-Anbiya’ [21] : 107)²¹

Atas dasar penegasan dari ayat di atas, Syekh Muhammad Abu Zahra dalam Kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain bukan menjadi sumber keburukan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama Muslim maupun non-Muslim dan merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada *syari'at*

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h., 375.

²¹ Q.S Al-Anbiya’ [21] : 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadist kecuali di dalamnya terdapat kemashlahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.²²

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka segala aspek tingkah laku maupun aspek lainnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."* Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan lagi bahwa, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*²³

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.²⁴ Ini disebabkan karena selain perkawinan itu sendiri merupakan akad yang suci, tetapi juga terdapat hubungan keperdataan dalam akad tersebut.²⁵ Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap

²² Sapiudin Shidiq, *Op. Cit*, h., 223-225.

²³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 51.

²⁴ Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatahan Konstitusi*, Jurnal ASAS, Vol. 6, No. 2, 2014), h., 102-103.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islami tujuan dari pernikahan tersebut akan terwujud.²⁶

Di Indonesia, pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan memberitahukan kehendak perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pemberitahuan dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar perkawinannya dapat tercatat secara administrasi ialah memberitahukan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai serta nama suami atau istri terdahulu jika calon mempelai sudah pernah menikah sebelumnya.

Selain itu juga harus adanya lampiran bukti yaitu kutipan akta kelahiran, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. Harus adanya izin tertulis/izin dari orang tua jika calon mempelai belum mencapai umur 21 Tahun.²⁷ Dalam hal

²⁶ Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 188.

²⁷ Jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat di antara orang-orang tersebut di atas atau salah seorang atau lebih di antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami masih memiliki istri yang sah, maka juga harus dilampirkan izin dari Pengadilan. Surat kematian atau surat keterangan perceraian istri atau suami terdahulu jika calon sudah pernah menikah sebelumnya.²⁸

Syarat penting lainnya yang harus ada ialah surat keterangan untuk menikah (model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat yang setingkat dengan itu yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa persyaratan yang ada.²⁹

Ini berarti, sebelum calon mempelai sebelum memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat daerah setempat dalam hal ini desa/kelurahan dengan persyaratan seperti yang tertuang dalam pasal 5 dan 6 PP No. 9 Tahun 1975 agar dapat memperoleh surat keterangan untuk menikah (model N-1) dari pejabat daerah tersebut.

Dalam Islam sahnya suatu perkawinan ialah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun berupa kerelaan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan serta adanya wali. Tidak ada syarat tambahan

mereka tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang seperti yang tersebut di atas. Lihat : Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lihat : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 524.

²⁸ *Ibid*, h., 547-548.

²⁹ Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5 ayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa izin dari pihak lain untuk menikah. Hal ini menunjukkan betapa *syari'at* Islam mempermudah manusia untuk beribadah dalam hal ini menikah. Hanya dibutuhkan izin dari kedua belah pihak serta wali dan adanya dua orang saksi agar tidak terjadinya fitnah dikemudian hari.

Nagari³⁰ Pakan Sinayan merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang terletak di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Nagari Pakan Sinayan ini adalah nagari yang membentang antara gunung Singgalang dan aliran Ngarai Sianok, sebelah barat berbatasan langsung dengan Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV koto, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu, sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung Gunung Singgalang dan selatan berbatasan dengan aliran Ngarai Sianok.

Penduduk Nagari Pakan Sinayan berjumlah 5.507 orang yang tersebar di 10 jorong³¹ di nagari tersebut dengan pemangku adat atau yang disebut *Niniak Mamak* berjumlah 49 orang. Luas wilayah Nagari Pakan Sinayan ialah 640 Ha dengan ketinggian wilayah 900-1200 dpl dan suhu rata-rata 18⁰C - 12⁰C.³²

³⁰ Nagari merupakan nama untuk wilayah di bawah kecamatan yang setara dengan desa atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari.

³¹ Jorong merupakan nama untuk pembagian wilayah dalam suatu nagari yang setara dengan RW yang dipimpin oleh seorang Wali Jorong.

³² Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Sinayan Tahun 2014-2020, h., 1, 6, 7 dan 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai Nagari terbaik di Sumatera Barat pada Tahun 2018³³, tingkat kesadaran hukum masyarakat Nagari Pakan Sinayan sangat tinggi termasuk dalam hal administrasi pencatatan perkawinan.

Dalam pengurusan administrasi perkawinan di Nagari Pakan Sinayan, selain syarat yang telah dikemukakan di atas, terdapat syarat penting lain yang harus ada pada calon mempelai yang hendak menikah. Syarat tersebut ialah harus adanya izin dari *niniak mamak* calon mempelai dibuktikan dengan tanda tangan 4 orang *niniak mamak* dari suku calon mempelai tersebut. Ini merupakan kesepakatan adat dari masyarakat Nagari Pakan Sinayan sendiri.

Karenanya, tanpa adanya izin dari *niniak mamak* calon mempelai, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan tidak tercatat dalam administrasi pencatatan perkawinan. Jikalaupun perkawinan tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di luar wilayah Nagari Pakan Sinayan.³⁴

Ini berarti, di Nagari Pakan Sinayan, jika calon mempelai tidak memperoleh izin dan tanda tangan dari *niniak mamak* calon yang berjumlah 4 orang, maka nagari tidak akan bisa memberikan surat keterangan untuk menikah (model N-1) yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

³³ <https://amcnews.co.id/2018/08/15/pakan-sinayan-nagari-berprestasi-terbaik-i-2018-di-sumb>
diakses pada tanggal 25 November 2018 pada pukul 08.43 WIB.

³⁴ H. HS. DT. Kayo Nan Kuniang, S.Ag (Wali Nagari Pakan Sinayan), Wawancara Via Telephone pada tanggal 14 November 2018 pukul 08.13 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di Nagari lain yang masih memegang teguh adat seperti Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sei. Sariak Kabupaten Padang Pariaman, tidak mengharuskan adanya izin tertulis. Cukup dengan meminta izin kepada salah seorang *mamak* yakni *mamak* kandung. Kemudian, *mamak* tersebut memberi tahu kepada *mamak* lainnya di dalam suku tersebut secara lisan. Sehingga, jika ada salah seorang atau beberapa *mamak* yang sedang tidak ada di tempat, izin dan restu tersebut dapat dilakukan via komunikasi telephone.³⁵

Masalah lainnya yang kemudian harus dihadapi ialah ketika ada salah seorang atau beberapa orang dari *niniak mamak* yang dimintai izinnya itu tidak sedang berada di rumah seperti pergi Jakarta atau ke daerah lain untuk suatu urusan sehingga calon mempelai sulit untuk mendapatkan izin berupa tanda tangan. Hal ini otomatis membuat calon mempelai menunda pengurusan administrasi perkawinannya sampai izin dapat diperoleh. Apalagi tanda tangan yang harus didapatkan tidak cuma satu, melainkan tiga (3) orang *niniak mamak* beserta wali jorong dan penasihat perkawinan Nagari.

Seringnya *niniak mamak* berada di luar daerah dibanding dengan di daerahnya juga merupakan masalah tersendiri yang sering dihadapi oleh *anak kamanakan*. Selain itu, banyaknya kesibukan *niniak mamak* selain sebagai *niniak mamak* dalam kaumnya juga menjadi hambatan tersendiri bagi *anak*

³⁵ Nurul Fauza (Salah seorang *anak kamanakan* suku Koto di nagari Lurah Ampalu), wawancara via telephone, pada tanggal 27 November 2018 pukul 7.11 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamanakan yang ingin mengurus perkawinannya. Proses dalam mencari *niniak mamak* untuk mendapatkan restu cukup sulit mengingat tidak hanya satu orang yang harus ditemui.³⁶

Selain itu, tidak adanya persetujuan dari *niniak mamak* dalam suatu perkawinan akan berdampak kepada status seseorang sebagai *anak kemenakan* dalam kaumnya. Hal ini mengingat Nagari Pakan Sinayan sangat berpegang teguh kepada adat istiadat yang ada. Sehingga ini akan berdampak kepada masalah-masalah adat selanjutnya yang melibatkan *niniak mamak*. Contohnya, jika terdapat sengketa atau masalah dalam perkawinan yang timbul setelah perkawinan itu terjadi, maka *niniak mamak* yang seharusnya bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat tidak akan mau ikut campur dengan masalahnya. Ini juga termasuk kepada masalah *walimah* yang akan sulit untuk dilaksanakan jika tidak adanya persetujuan dari *niniak mamak* ini.

Ini bertentangan kaidah di mana *syari'at* Islam menghendaki adanya kemudahan dan menghindari kesulitan apalagi untuk urusan ibadah seperti perkawinan ini. Dalam sebuah hadist dijelaskan, *يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا* “*Buatlah mudah, jangan mempersulit*”. Hadist tersebut menjadi dalil dari peniadaan kesulitan dalam hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy Syafi'i

³⁶ Ermi Yenti (*anak kemenakan suku Tanjung*), Wawancara via Telephone pada tanggal 25 November 2018 pukul 07.23 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al Umm, إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ “Jika perkara itu sempit, maka jadilah lapang.”³⁷

Harus adanya tanda tangan dari *niniak mamak* sebagai tanda restu dari *niniak mamak* atas perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut menyulitkan masyarakat khususnya *anak kemenakan* yang memiliki *niniak mamak* yang cenderung sulit untuk ditemui. Padahal ibadah seperti perkawinan harus segera diselenggarakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “*Izin Niniak Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam.*”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Mekanisme Izin *Niniak Mamak* Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu dalam perkawinan yang terjadi pada tahun 2018.

³⁷ <https://rumaysho.com/2988-kaedah-fikih-5-kesulitan-mendatangkan-kemudahan.html> diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 11.45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme izin tertulis *niniak mamak* dalam Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme izin tertulis *niniak mamak* dalam Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai izin tertulis *niniak mamak* sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan rukun dan syarat dalam perkawinan.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang Izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal, layak serta valid perlu disusun rangkaian metode yang akan dijadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di daerah Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

2. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah nagari, masyarakat dan *niniak mamak* yang ada di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan sebagai syarat administrasi perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan yang di dalamnya dapat di peroleh data yakni masyarakat di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang telah menikah pada tahun 2018 sebanyak 64 orang serta *niniak mamak* yang baru *dilewakan* pada 27 Desember 2018 yakni berjumlah 49 orang serta 1 orang pemerintah nagari. Untuk masyarakat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti akan mengambil 50% dari total populasi yakni sekitar 32 orang. Sampel yang diambil dari *niniak mamak* dalam penelitian ini yaitu 50% dari 49 orang *niniak mamak* yakni sekitar 25 orang yang terdiri dari *Datuak*, *Bagindo*, *Angku* dan *Sutan* dari suku yang berbeda serta pemerintah nagari yang berjumlah 1 orang.

4. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari dua data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini ialah informasi dan data yang diperoleh dari subjek penelitian yakni pemerintah Nagari Pakan Sinayan, *niniak mamak* Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu dan masyarakat yang sudah menikah di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang menikah dari tahun 2018.

b. Data sekunder

Diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel maupun skripsi yang membahas tentang rukun dan syarat dalam perkawinan dalam Hukum Islam, syarat administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan terhadap suatu objek atau subjek dengan maksud untuk memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan penelitian ini.

Fenomena yang akan diobservasi adalah mengenai sistem administrasi pendaftaran kehendak nikah dan Izin Tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan di Nagari Pakan Sinayan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada subjek penelitian guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penelitian ini. Pertanyaan yang akan diajukan yakni mengenai pemahaman subjek tentang izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan, kendala yang dihadapi dalam mengurus izin tertulis *niniak mamak* serta manfaat yang dirasakan persyaratan Izin Tertulis *niniak mamak* ini dalam perkawinan.

c. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden yang menjadi subjek dari penelitian guna mendapatkan data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan untuk penelitian ini. Pertanyaan yang akan diajukan seputar pemahaman subjek mengenai mekanisme izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan sehubungan dengan pemahaman dan kendala yang dihadapi dalam mengurus izin tertulis *niniak mamak* serta manfaat yang dirasakan persyaratan Izin Tertulis *niniak mamak* ini dalam perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis dengan cara *Deskriptif Kualitatif*, di mana peneliti akan menggambarkan secara detail mengenai subjek dan objek penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dan survey serta mengumpulkan data mengenai izin tertulis *Niniak mamak* sebagai syarat administrasi perkawinan di Nagari Pakan Sinayan. Selanjutnya peneliti akan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang telah didapatkan di lapangan.

7. Teknik Penulisan

Data yang telah diperoleh akan disusun dengan metode *deduktif* yakni dengan melakukan pendekatan analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diolah dan menghasilkan data yang bersifat khusus (kesimpulan). Penulisan akan diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan hal-hal yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dari semua data yang telah dibaca sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang berisi mengenai sejarah, visi misi, kondisi sosial dan gambaran kependudukan Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisi tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat dalam perkawinan dalam Islam, tujuan dari perkawinan tersebut serta syarat perkawinan dan administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang izin tertulis *niniak mamak* sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Mengenai dan Tinjauan Islam tentang izin tertulis *niniak mamak* sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.

BAB V

PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu³⁸

Nagari Pakan Sinayan adalah nagari³⁹ yang membentang antara gunung Singgalang dan aliran Ngarai⁴⁰ Sianok, sebelah barat berbatasan langsung dengan Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV koto, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu, sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung Gunung Singgalang dan selatan berbatasan dengan aliran Ngarai Sianok.

³⁸ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Sinayan Tahun 2014-2020, h., 1-6.

³⁹ Nagari merupakan wilayah yang otonom (*adat salingka nagari*) yaitu satu kesatuan hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas- batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya. Lihat : Lia Saftri, Ichsan Malik, Josephine R. Marietta, *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat*, (Jurnal Pertahanan & Bela Negara April 2018, Volume 8 Nomor 1), h., 148.

⁴⁰ Ngarai atau disebut sebagai *canyon* dalam bahasa Inggris Amerika atau *cañon* dari bahasa Spanyol, adalah sebuah lembah dalam bersisi terjal yang terbentuk akibat erosi aliran air sungai. Ngarai juga dapat diartikan sebagai lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang sangat curam. Lihat : <https://id.wikipedia.org/wiki/Ngarai> diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 13.05 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakan Sinayan berasal dari dua suku kata "*Pakan*" dan "*Sinayan*", kata-kata *Pakan*⁴¹ adalah ungkapan dalam bahasa Minangkabau yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti pasar atau balai. Yaitu tempat yang disepakati untuk melakukan transaksi jual beli guna mendapatkan segala kebutuhan hidup sehari-hari serta berbagai aktifitas ekonomi lainnya oleh banyak orang. Sedangkan *Sinayan* adalah salah satu nama hari dari tujuh hari dalam satu minggu yaitu hari Senin.

Jadi terminologi *Pakan Sinayan* adalah nama tempat melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya pada hari Senin yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahkan ada yang dari luar *Pakan Sinayan* sendiri seperti Matur dan Malalak. Nama ini yang kemudian disepakati menjadi sebuah wilayah tempat berdiamnya satu kesatuan masyarakat adat yang diikat dengan tali suku dan memiliki kedekatan emosional antara satu dengan yang lainnya.

Nagari *Pakan Sinayan* dulunya merupakan komunitas kecil yang mengawali menetap dengan membuka lahan pemukiman (*manaruko*) di

⁴¹ *Pakan* (*pekan*) dalam konsep etimologis masyarakat Minangkabau merujuk pada tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang diselenggarakan pada salah satu hari dalam sepekan. Oleh sebab itu *pekan* merupakan kegiatan pasar yang berlangsung dalam sekali seminggu pada hari tertentu dan dilaksanakan secara berulang dan tetap. Nama *pekan*, oleh karena itu, selalu dihubungkan dengan nama hari sepekan, yaitu *pekan sinayan* (pasar senen), *pekan salasa* (pasar selasa), *paka rabaa* (pasar rabu), *pekan kamih* (pasar kamis), *pekan jumat* (pasar jumat), *pekan sabtu* (pasar sabtu), dan *pekan akad* (pasar minggu). Lihat : Damsar dan Indrayani, *Konstruksi Sosial Budaya Minangkabau Atas Pasar*, (Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Juni 2016 Vol. 18 No. 1), h., 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelah timur nagari Pakan Sinayan. Lokasi tempat menetap tersebut dinamakan dengan "*Cupak Sungai Tanang*" yang terdiri dari 4 suku, di antaranya, suku Melayu, suku Koto, suku Jambak dan suku Tanjuang. Empat suku ini terus berkembang ditambah dengan suku lain yang bergabung (*malakok*) dan ada juga yang membelah diri dengan istilah "*Basiba Baju*". Karena jumlahnya semakin bertambah semakin banyak pula lahan yang sudah di buka, bahkan tidak hanya di sekitar wilayah Cupak Sungai Tanang yang berada di wilayah Timur Pakan Sinayan melainkan sudah menyebar ke beberapa lokasi baru di wilayah barat, utara dan selatan. Penyebaran pemukiman dari wilayah Cupak Sungai Tanang ini menumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat baru dengan daerah asal dan suku yang beragam pula.

Rata-rata kehidupan masyarakat Pakan Sinayan awalnya adalah dengan bertani, hal ini didorong oleh kondisi tanahnya yang subur berada antara Gunung Singgalang dan aliran Ngarai Sianok. Adapun tanaman yang dikembangkan adalah tanaman pangan, sayur-sayuran serta tanaman tebu. Bahkan tidak saja dikenal dengan produksi sayur-sayuran, masyarakat Pakan Sinayan juga dikenal piawai dalam pembibitan sayur mayur sehingga muncul anekdot oleh masyarakat sekitarnya dengan menyebut masyarakat "*panjua anak*" (penjual anak), yang dimaksud "anak" adalah anak cabe dan anak terung yang dibibitkan oleh masyarakat Pakan Sinayan. Di samping dikenal sebagai penghasil sayur dan tanaman pangan, masyarakat Pakan Sinayan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kenal penghasil gula yang diolah dari tanaman tebu yang akrab di sebut dengan "*Gulo Saka*"

Secara hubungan kekerabatan, masyarakat Pakan Sinayan cenderung melaksanakan sistim kekerabatan adat Bodi Caniago⁴², di mana untuk mendapatkan satu keputusan didasarkan kepada musyawarah mufakat dan setiap pangulu yang ada di nagari di berada sejajar dan memiliki hak yang sama dalam kerapatan.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda sistem pemerintahan di kenal dengan sistim pemerintahan kelarasan, di mana satu kelarasan dipimpin oleh seorang angku Laras (angku Lareh). Banuhampu⁴³ termasuk salah satu kelarasan yang ada dalam pemerintahan Luhak Agam⁴⁴. Dalam Kelarasan

⁴² Dalam budaya Minangkabau, terdapat dua *lareh* atau keselarasan yang utama yaitu Kelarasan *Koto Piliang* dan Kelarasan *Bodi Caniago*. Kelarasan *Koto Piliang* berasal dari *Datuak* Ketumanggungan dan kelarasan *Bodi Caniago* berasal dari *Datuak* Perpatih Nan Sabatang. Sifat pemerintahan keselarasan *Koto Piliang* mengikuti aturan yang digariskan dari atas serupa dengan demokrasi terpimpin sedangkan kelarasan *Bodi Caniago* memiliki polamusyawarah antar sesama suku. Lihat : Merisa Asrina, *Kajian Karakter Lanskap Minangkabau Berdasarkan Karya Sastra Tambo Minangkabau*, (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2018), h., 6.

⁴³ Banuhampu adalah suatu kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terdiri dari 7 nagari, yaitu Cingkariang, Kubang Putih, Ladang Laweh, Padang Lua, Pakan Sinayan, Sungai Tanang, dan Taluak Ampek Suku dengan luas 28,45 km². Kecamatan Banuhampu memiliki jumlah penduduk 36.800 jiwa dengan kepadatan 1292 jiwa/km². Lihat : <https://min.wikipedia.org/wiki/Banuhampu>,_Agam diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 13.32 WIB.

⁴⁴ Luhak Agam merupakan salah satu kawasan konfederasi dari beberapa nagari dalam budaya Alam Minangkabau. Bersama dengan Luhak Tanah Datar dan Luhak Limo Puluah dikenal dengan nama Luhak Nan Tigo. Kawasan Luhak Agam ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda dijadikan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Menurut Tambo, awal mula didirikannya Luhak Agam ialah perpindahan penduduk dari nagari Pariangan yang berlangsung selama empat periode. Periode pertama, melahirkan empat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banuhampu tergabung di dalamnya Nagari Padang Lua, Nagari Kubang Putih dan Nagari Taluak IV Suku dan setiap nagari di pimpin oleh seorang wali nagari yang di kenal dengan istilah "*Angku Palo*" atau "*Inyiak Wali*", sedangkan dalam nagari Padang Lua terhimpun Pakan Sinayan, Cingkariang, Sungai Tanang, Ladang Laweh dan nagari Padang Lua sendiri.

Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 1945, tepatnya di akhir tahun 1942 wali Nagari Padang Lua Dt Batuah meletakkan jabatannya, maka untuk menjalankan roda pemerintahan di angkatlah Pelaksana Harian yaitu Dt Kayo dari Pakan Sinayan yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris (manti) Nagari Padang Lua.

Pada masa pemerintahan Dt Kayo inilah mulai muncul gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat Pakan Sinayan unsur *niniak mamak*, Alim ulama dan *cadiak pandai* untuk memisahkan diri dari nagari Padang Lua dan dapat menyelenggarakan pemerintahan secara defenitif.

buah nagari, yakni Biaro, Balai Gurah, Lambah dan Panampuang. Kemudian di periode kedua, melahirkan tiga buah nagari, yakni Canduang Koto Laweh, Kurai dan Banuhampu. Periode ketiga, melahirkan 4 buah nagari, yakni Sianok, Koto Gadang, Guguak dan Guguak Tabek Sarajo. Dan di periode keempat, melahirkan lima buah nagari, yakni Sariak, Sungai Puar, Batagak dan Batu Palano.

Kemudian lahir pula nagari-nagari lainnya seperti Kapau, Gadut, Salo, Koto Baru, Magek, Tilatang Kamang, Tabek Panjang, Pincuran Puti, Koto Tinggi, Simarasok dan Padang Tarok. Lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/Luhak_Agam diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 13.35 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah mengadakan rapat secara maraton maka pada pertengahan tahun 1943 dapatlah kesepakatan memisahkan diri dari Nagari Padang Lua dengan alasan untuk memudahkan masyarakat dalam berurusan serta dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri tanpa menginduk ke Nagari Padang Lua. Kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk surat yang akan di ajukan kepada Asisten Demang terus kepada Demang dan kepada Residen.

Wali Nagari Pakan Sinayan dari masa ke masa yaitu :

NO.	PERIODE	WALI NAGARI
1.	1942-1943	Datuak Kayo
2.	1959	Umar Datuak Tumangguang
3.	-	Ali Umar Labai Bagindo
4.	1976	Adis Datuak Mangkudun
5.	1979	Sayan Datuak Rajo Endah
6.	2002-2007	Fardinal Sutan Menan
7.	2008-2014	HS. Datuak Kayo Nan Kuniang
8.	2014-2020	HS. Datuak Kayo Nan Kuniang

Tabel 0.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu⁴⁵

2.2.1 Visi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Nagari Pakan Sinayan tidak terlepas dari rumusan Visi dan Misi pembangunan nagari sebagai penyatuan arah dalam menentukan rencana kerja pembangunan enam tahun ke depan yakni pada periode tahun 2014-2020. Visi Nagari Pakan Sinayan ialah “Pakan Sinayan Bermartabat, kuat dan Madani”.

Bermartabat, adalah masyarakat yang memiliki harga diri dan pandangan jauh ke depan, mengutamakan pentingnya pendidikan, menempatkan nilai-nilai moral pada tempat yang tinggi dan mampu hidup dalam keberagaman dan perbedaan serta gigih dan ulet dalam menggapai masa depan yang lebih baik, implementasi adalah:

- a. Masyarakat yang punya kemandirian dalam menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung kepada pihak lain.
- b. Masyarakat yang mampu memanfaatkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin untuk kemajuan.

⁴⁵ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Sinayan Tahun 2014-2020, h., 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masyarakat yang mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui semangat kebersamaan, kekeluargaan dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan agama.

Kuat, masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang memiliki ketahanan lahir bathin, sandang pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta akidah. Hal ini dapat diukur dengan :

- a. Masyarakat yang dapat memanfaatkan kemajemukan suku, pendidikan, ekonomi dan pilihan politik yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat guna mewujudkan cita-cita bersama.
- b. Masyarakat yang dapat memanfaatkan dan menggali potensi yang ada untuk menutupi kebutuhan pokok seperti sandang pangan, pendidikan dan kesehatan.
- c. Masyarakat yang dapat memberikan rasa aman kepada saudaranya dalam mengekspresikan diri dan menyatakan pendapat.
- d. Masyarakat yang memiliki aqidah dan keyakinan akan adanya hidup setelah hidup di dunia, sehingga dia menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah dan berbuat yang terbaik untuk itu.

Madani, masyarakat madani adalah contoh masyarakat yang dapat pembinaan langsung dari Rasulullah, yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik, tidak gagap dengan kemajuan teknologi, memiliki kemampuan hidup dengan dinamika globalisasi, menghargai perbedaan, dan mampu melakoni hidup dalam bingkai mencari ridha Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan *Pakan Sinayan Bermartabat, Kuat Dan Madani* adalah, terwujudnya masyarakat Pakan Sinayan yang memiliki ketahanan lahir batin, kuat dalam keyakinan, ulet untuk mencapai kemajuan serta taat dalam menjalankan dan mengamalkan agama dan adat istiadat, rukun hidup dalam kebersamaan.

2.2.2 Misi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu

- a. Optimalisasi Sumber daya alam secara maksimal
- b. Terwujudnya kekuatan sosial dalam bingkai kebersamaan
- c. Pemberdayaan sumber daya manusia untuk kepentingan pembangunan nagari
- d. Terwujudnya masyarakat dengan aqidah kuat dan menjalankan adat istiadat.

2.3 Kondisi Sosial⁴⁶**2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD/Belum Sekolah	1.609
2	SD	1.427
3	SLTP	1.126

⁴⁶ Format dan Laporan Profil Desa/Kelurahan Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Bulan Desember Tahun 2017, h., 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	SLTA	982
5	Diploma 1-2	73
6	Diploma 3	87
7	S1	189
8	S2	14
9	S3	0
	Total	5.507

Tabel 0.2

2.3.2 Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan untuk melayani masyarakat Pakan Sinayan ada 3 yaitu:

1. Puskesmas Pembantu
2. Polides
3. Pos Kesehatan Nagari (Poskesri).⁴⁷

⁴⁷ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Sinayan Tahun 2014-2020, h., 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Agama⁴⁸**a. Sarana Ibadah**

No	Nama Mesjid /Mushalla	Jorong
1	Mushalla Al Wustha	Tobo Ladang
2	Mushalla Al Abrar	Tobo Ladang
3	Mushalla Annur	Tobo Ladang
4	Mushalla Al Furqan	Tobo Ladang
5	Mushalla Mukminin	Surau Baru
6	Mushalla Al Ikhlas	Surau Baru
7	Mesjid Jami'	Surau Baru
8	Mushalla Surau Tengko	Ladang Lungguk Batu
9	Mushalla Al Falah	Ladang Lungguk Batu
10	Mushalla Nurul Hidayah	Cupak
11	Mushalla Baitul Huda	Kandang Jilatang
12	Mushalla Tanjuang	Kalampayan
13	Mesjid Baiturrahman	Kalampayan
14	Mushalla Al Ihsan	Dalam Koto

⁴⁸ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15	Mushalla Darussalam	Tiagan
16	Mushalla Baiturrahim	Kubu Anau
17	Mushalla Nurul Huda	Tabek Sarikan
18	Mushalla Surau Tengah	Kalampaian

Tabel 0.3

- b. Pendidikan Dasar Agama Pendidikan Dasar Agama di Nagari

Pakan Sinayan ada 4 yakni :

 1. MDA Al Insan Sabil
 2. MDA Tsanawiyah
 3. MDA Baiturrahman
 4. SDN 24 Pakan Sinayan Plus MDA
- c. Pondok Tahfiz Al-Qur'an di Nagari Pakan Sinayan ada 2, yakni:
 1. Pondok Tahfiz Baitirrahman
 2. Yayasan Pondok Tahfis Amaruddin Lim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Gambaran Kependudukan

2.4.1 Jumlah Penduduk⁴⁹

Jumlah Laki-laki	2.721 orang
Jumlah Perempuan	2.786 orang
Jumlah Total	5.507 orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.396 KK
Kepadatan Penduduk	0,116 per km

2.4.2 Jumlah Penduduk Per Jorong⁵⁰

N O	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1	Surau Baru	477	484	961	239
2	Ladang Lg Batu	246	239	485	125
3	Cupak	171	182	353	89
4	Kandang Jilatang	146	139	285	72
5	Kalampayan	236	216	452	113
6	Dalam Koto	105	102	207	55
7	Tobo Ladang	681	731	1412	362
8	Tiagan	176	215	391	97
9	Kubu Anau	258	226	484	119

⁴⁹ Format dan Laporan Profil Desa/Kelurahan Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Bulan Desember Tahun 2017, h., 19.

⁵⁰ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Sinayan Tahun 2014-2020, h., 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Tabek Sarik an	225	252	477	125
	Total	2.721	2.786	5.507	1.396

Tabel 0.4

2.4.3 Jumlah Warga Nagari Berdasarkan Jenis Usia⁵¹

NO	USIA	JUMLAH (Jiwa)
1	0-12 BLN – 5 Tahun	348
2	6 Tahun – 10 Tahun	547
3	11 Tahun – 15 Tahun	567
4	16 Tahun – 20 Tahun	569
5	21 Tahun – 25 Tahun	533
6	26 Tahun – 30 Tahun	467
7	31 Tahun – 35 Tahun	454
8	36 Tahun – 40 Tahun	363
9	41 Tahun – 45 Tahun	329
10	46 Tahun – 50 Tahun	270
11	51 Tahun – 55 Tahun	284
12	56 Tahun – 60 Tahun	237
13	61 Tahun – 65 Tahun	195
14	66 Tahun – 70 Tahun	118
15	71 Tahun >	226
	Total	5.507

Tabel 0.5

⁵¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

3.1 Syarat Perkawinan

3.1.1 Pengertian Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata *kawin* yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*.⁵² Perkawinan menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵³ Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵⁴

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan النِّكَاحُ (*Al-Nikah*) yang bermakna الضَّمُّ أَوْ الْجَمْعُ⁵⁵ yaitu himpunan atau kesatuan, dapat pula bermakna

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Loc. Cit.*

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h., 8. Lihat juga : Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h., 2 Lihat juga : Musto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto), h., 333.

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h., 374.

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, h., 208 dan 828.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhimpunnya satu dengan yang lainnya.⁵⁶ Makna nikah juga diartikan sebagai *aqdu al-tazwij*, yang artinya akad nikah. Kata nikah kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Namun kata nikah tetap sering dipergunakan karena telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.⁵⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan adalah janji yang diucapkan dan diberi tanda kemudian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan oleh beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan.⁵⁸

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia sendiri “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin umum digunakan untuk

⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h., 31. Lihat juga: Siti Teny Nurfalidah, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan yang Diakibatkan Kehamilan*, (Jurnal: Prosiding Peradilan Agama Vol. 4, No. 8), h., 3. Lihat juga : Wahyu Wibisana, *Op. Cit.*, h., 186.

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Loc. Cit.* Lihat juga : Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc. Cit.* Lihat juga: Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, h., 11. Lihat Juga: Wahyu Wibisana, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Amran Ys Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 300.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan kata nikah hanya digunakan untuk manusia.⁵⁹

Anwar Harjono mengatakan Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan Perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁶⁰

Wirjono Prodjodikoro berpendapat perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.⁶¹

Pengertian perkawinan menurut ulama empat mazhab yakni Mazhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pada umumnya mendefinisikan perkawinan kepada :

*“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”*⁶²

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

⁵⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 9.

⁶⁰ R. Abdul Djarnali, *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h., 47.

⁶¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h., 3.

⁶² Wahyu Wibisana, h., 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶³

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan sebagai perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima unsur dalam perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶³ R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Op. Cit*, h., 537. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 522. Lihat Juga: Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 51.

⁶⁴ Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan, Buku I Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Lihat : Kardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2013), h., 131. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 569.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

a. Al- Qur'an

1. An-Nisa' [4] : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي آلَيْتَيْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتُلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶⁵

2. Ar-Ra'du [13] : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”⁶⁶

⁶⁵ Q.S An-Nisa [4] : 3. Lihat : Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h., 374. Lihat juga : Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h., 394.

⁶⁶ Q.S Ar-Ra'du [13] : 38. Lihat juga: Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Op. Cit*, h., 402.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ar-Rum [30] : 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁷

4. Adz-Dzariyat [51] : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁶⁸

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia itu berpasangan dalam rangka memperoleh keturunan dengan jalan yang baik yakni perkawinan agar timbul rasa tenang dan tenteran dalam diri manusia serta sebagai tanda kebesaran Allah SWT.

⁶⁷ Q.S Ar-Rum [30] : 21. Lihat juga : *Ibid.*

⁶⁸ Q.S Adz-Dzariyaat [51] : 49. Lihat juga : Tihami dan Sohrani, *Op. Cit*, h., 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.”⁶⁹

Hadits di atas menginformasikan bahwa bagi yang merasa sudah sanggup untuk memikul beban pernikahan dan bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dilakukan ketika telah menikah, maka menikah merupakan keharusan baginya.

Ini berarti, dalam Islam menikah merupakan sesuatu yang harus disegerakan ketika seseorang merasa telah sanggup dan yakin bahwa ia mampu untuk menjalani tanggung jawab kehidupan pernikahan. Selain itu, di dalam diri manusia sendiri memang telah di fitrahkan untuk melakukan pernikahan tersebut sebagaimana itu seperti yang disunnahkan oleh Nabi SAW.

⁶⁹ Muhammad Fu'ad Adbu Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, Hadits No. 884, Hadits Riwayat Bukhari, no. 69, Kitab Nikah, Bab 2, h., 206. Lihat : Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Op. Cit*, h., 162-163. Lihat juga: Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Op. Cit*, h., 647-648. Lihat juga: Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, Hadits Nomor 826, *Op. Cit*, h., 190. Lihat Juga : Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h., 375.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu seperti yang disunnahkan oleh Nabi SAW karena pernikahan sendiri merupakan jalan untuk menahan diri dari syahwat dan dosa.

3.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

Dari sudut kepentingan pernikahan, Allah SWT memberikan aturan, ketentuan dan hukum-hukum terperinci sejak permulaan pemikahan peminangan hingga kesempurnaannya untuk menjaga hak-hak semua pihak.⁷⁰

⁷⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h., 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu seperti ruku' dalam shalat.⁷¹

Rukun yang hakiki dalam pernikahan ialah ridha dari kedua belah pihak serta adanya keinginan keduanya untuk mengikat tali pernikahan.⁷² Tanpa adanya keridhaan dari pihak yang hendak mengikat diri dalam tali pernikahan, maka tujuan dari pernikahan tersebut yakni membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan sulit dicapai. Akibat lain yang ditimbulkan dari pernikahan seperti ini ialah mudahnya rumah tangga tersebut retak dan ketidaknyamanan hati yang seharusnya tidak terjadi jika pernikahan tersebut didasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang hendak menikah.

Rukun dalam perkawinan yaitu :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi
- d. Wali
- e. Shighat *ijab qabul*.⁷³

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 12.

⁷² Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Loc. Cit*.

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h., 382-383. Lihat juga : Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 1. Lihat juga : Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun perkawinan di atas juga sesuai dengan yang tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.⁷⁴

Terjadinya *ijab* dan *qabul* mengharuskan adanya dua pihak yang berakad dan tempat akad. Para ulama fiqh umumnya meringkas pendapat mereka bahwa rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul*.⁷⁵

Yang dimaksud dengan syarat dalam perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan *Ijab qabul*. Selain itu syarat lain dalam perkawinan yang bukan merupakan pertalian dalam rukun perkawinan ialah mahar.

3.1.4 Syarat Sah Perkawinan di Indonesia

Dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 4 yaitu :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁷⁴ Mardani, *Op. Cit*, h., 133. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 571.

⁷⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Loc. Cit*. Lihat juga : Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Op. Cit*, h., 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang sah di Indonesia ialah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Syarat sah perkawinan lainnya menurut Undang-undang perkawinan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
- c. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak
- d. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁷⁷

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil

⁷⁶ Muhammad Amin Suma, *Loc. Cit.*

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h., 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif. Sedangkan syarat formil yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Sebagai negara hukum, maka perkawinan di Indonesia baru bisa dianggap sah apabila syarat materiil dan formil dari perkawinan tersebut telah tercapai.

Syarat materiil perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) KHI).

Hukum Perdata di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah persetujuan calon mempelai. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati memasuki hidup kehidupan rumah tangga. Sehingga tujuan dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan (*sakinah*) dan kebahagiaan (*sa'adah*), berdasarkan *mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan. Hal ini dikarenakan persetujuan tidak mungkin atau sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak saling mengenal. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita dan pada tahap akhir dilakukan oleh petugas atau Pegawai Pencatat Nikah⁷⁸ sebelum akad nikah dilangsungkan.⁷⁹

- b. Calon mempelai pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).

Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan batas usia ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)⁸⁰ didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan

⁷⁸ Pegawai Pencatat Nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 pada tiap- tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lihat : Ketentuan Umum Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (1) huruf a. Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.* h., 636.

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h., 57-58.

⁸⁰ Bunyi Pasal 15 ayat (1) KHI : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lihat : Mardani, *Op. Cit.* h., 134. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.* h., 571.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah.

Di samping itu, perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka UU ini menentukan batas usia perkawinan yang baik untuk menikah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁸¹

Ayat di atas merupakan petunjuk (*dalalah*) yang bersifat umum yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Selain itu, berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia

⁸¹ Q.S An-Nisa' [4] : 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*⁸²

Ayat di atas merupakan petunjuk (*dalalah*) yang bersifat umum yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Selain itu, berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.⁸³

Selain itu, apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan wajib mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2)⁸⁴ UU Perkawinan.⁸⁵

c. Wali Nikah

⁸² Q.S An-Nisa' [4] : 9

⁸³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 59-60.

⁸⁴ Pasal 7 ayat (2) berbunyi : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Lihat : Mardani, *Op. Cit*, h., 70.

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai di mana wali nikah tersebut bertindak sebagai orang yang menikahkan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, maka status perkawinan menjadi tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan mengenai wali ini sebagai berikut: *“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”*⁸⁶

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

⁸⁶ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 572.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat(2)⁸⁷ Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum

⁸⁷ Pasal 3 ayat (2) berbunyi : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lihat : Mardani, *Op. Cit.* h., 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Dari uraian di atas mengatakan bahwa suatu perkawinan harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan berlangsung agar perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.⁸⁸

3.1.5 Pencatatan Perkawinan di Indonesia

3.1.5.1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencacatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.⁸⁹

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973⁹⁰ yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) hingga dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.⁹¹

⁸⁹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h., 18. Lihat juga : Moh. Mahmud dan Bahtiar Agus Pribadi, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama) KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016), h., 20.

⁹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h., 1.

⁹¹ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jurnal : Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017), h., 255-256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pencatatan perkawinan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) menjelaskan : *“Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”*⁹²

3.1.5.2 Prosedur Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”* Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

⁹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 93. Lihat Juga : Mardani, *Op. Cit*, h., 131. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 569.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian sahnyanya suatu perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Dengan adanya peraturan tersebut maka semakin jelas dan tegaslah bahwa suatu perkawinan itu harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.⁹³

Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai Pemberitahuan Kehendak Nikah sebagai berikut : *“Orang yang hendak menikah membawa surat*

⁹³ Andini Gita Purnama Sari, *Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Relevansinya dengan Hukum Islam*, (Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013), h., 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan untuk nikah (model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.”⁹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.⁹⁵

Adapun mengenai syarat-syarat yang hendak dibawa ketika melakukan pemberitahuan kehendak nikah dalam rangka memenuhi syarat administrasi pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) peraturan tersebut yakni :

- a. Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-2
- c. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3

⁹⁴ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 718.

⁹⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dan kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4
- e. Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5
- f. Dalam hal tidak ada izin dari orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari pengadilan
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun
- h. Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya
- i. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- j. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah
- l. Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, h., 719.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formalitas tertentu diperlukan bagi kelangsungan perkawinan di mana adanya suatu akta yang diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan dalam hal ini akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam.⁹⁷

3.2 Izin Perkawinan dalam Islam

3.2.1 Izin Wali

Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya bahwa keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting di mana wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai. Wali nikah bertindak sebagai orang yang menikahkan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, maka status perkawinan menjadi tidak sah. Ini berarti jika wali khususnya dari perempuan tidak memberikan izin untuk perempuan tersebut menikah, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Wali secara etimologi yakni artinya penguasa atau pelindung. Menurut istilah fiqh, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama

⁹⁷ Ibid, h., 547-550. Lihat juga : Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h., 99-103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau baran. Sedangkan orang yang diberikan kekuasaan perwalian disebut wali⁹⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan mengenai wali ini sebagai berikut: *“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”*⁹⁹

Untuk itu, sebelum terjadinya perkawinan maka terlebih dahulu calon mempelai memperoleh izin dari wali-nya yang sesuai dengan syarat dalam hukum Islam. Ini dikarenakan ketika terjadinya akad nikah, wali dari pihak perempuan yang bertindak sebagai orang yang menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Oleh sebab itu, perkawinan akan sangat sulit terjadi jika wali tersebut tidak memberikan izin.

Para ulama berbeda pendapat dalam memposisikan wali dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Imam Malik dan Syafi’I berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, wali merupakan syarat sahnya perkawinan.

⁹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h., 89. Lihat juga : Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bula Bintang, 1993), h., 92.

⁹⁹ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 572.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi dan Az-zuhiri berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sebanding (sekufu) maka pernikahannya boleh.
- c. Sedangkan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda¹⁰⁰.

3.2.2 Izin Calon Mempelai

Setelah kedatangan Islam, wanita mendapat kedudukan yang setara dengan pria dan wanita dapat lebih bebas dalam menentukan pilihannya. Selain itu, wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh walinya, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan, baik mudharat duniawi maupun mudharat keagamaan.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa rukun yang hakiki dalam pernikahan ialah ridha dari kedua belah pihak serta adanya keinginan keduanya untuk mengikat tali pernikahan.¹⁰¹ Ini berarti bahwa untuk melaksanakan pernikahan dalam Islam yang paling utama yaitu adanya ridha dari kedua calon mempelai untuk saling mengikat diri dalam tali pernikahan. Sehingga wali dari pihak perempuan tidak boleh menikahkan

¹⁰⁰ Slamet Abidin, dkk, *Op. Cit*, h., 84. Lihat juga : Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h., 409.

¹⁰¹ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Loc. Cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang berada dalam perwaliannya sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada wanita tersebut.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. telah mengatakan bahwa seorang wali tidaklah boleh memaksa untuk menikahkan seseorang yang diwalikannya. Seperti yang terdapat dalam hadits berikut :

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. berkata :

حديث أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي: 67 كتاب النكاح: 41 باب لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبُكَرُ وَالثَّيْبُ إِلَّا بِرِضَاهَا

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Lalu mereka bertanya, *“Ya Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izinnya?”* Beliau pun menjawab, *“Dengan ia diam.”* (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰²

Lalu dari Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah SAW. pernah bersabda :

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya.” (HR. Muslim)¹⁰³

¹⁰² Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, Hadits No. 838, *Op. Cit*, h., 193,. Lihat juga: Lu'Lual Marjan, Hadits No. 895, Kitab Nikah. Lihat juga: Ibn Rusyd, *Op. Cit*, h., 398. Lihat juga: Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, terj. jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h., 724. Lihat juga: Ibn Qudamah, *al Mughni*, terj. jil. 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h., 317.

¹⁰³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, *Loc. Cit*, Kitab Nikah, Hadits No. 839. Ibn Rusyd, *Loc. Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa hadits di atas dapat kita ketahui bahwa dalam perihal menikah seorang wanita tidak boleh dipaksakan untuk menikah jika ia merasa belum siap dan tidak mau.¹⁰⁴

Pada masa Rasulullah SAW sendiri pun ada seorang wanita yang menolak lamaran pria. Dalam Islam terdapat kisah, seorang janda bernama Fathimah binti Qais. Setelah ia selesai dengan masa iddahnya, Fathimah mendatangi Rasulullah SAW. untuk meminta pertimbangan bahwa ia dilamar oleh dua orang pria. Para lelaki yang melamar Fathimah adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Setelah itu, Rasulullah SAW. mengeluarkan pendapatnya, yaitu beliau menyarankan untuk menolak kedua lelaki tersebut.

Rasulullah berkata kepada Fathimah :

“Abu Jahm merupakan orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (seseorang yang kejam, keras dan suka bepergian jauh), sedangkan Mu'awiyah seorang yang miskin, tidak berharta,”

Kemudian Rasulullah SAW. melanjutkan, *“Oleh karena itu, menikahlah dengan Usamah bin Zaid.”* Namun ketika itu Fathimah tidak mencintai Usamah. Rasulullah menyarankan agar Fathimah menikah dengan Usamah dikarenakan Usamah adalah seseorang yang memiliki perangai yang cocok dengan Fathimah dan hal tersebut dapat menciptakan keharmonisan

¹⁰⁴ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menolak-lamaran-pria-dalam-islam> diakses pada 27 Maret 2019 pukul 18.59 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta keselarasan dalam rumah tangga. Fathimah pun taat kepada saran Rasulullah SAW, lalu setelah menikah Fathimah datang kepada Rasulullah dan berkata, *“Setelah menikah dengannya, Allah SWT. memberikan kebaikan padaku dengan dirinya, sehingga aku dicemburui oleh wanita-wanita lain.”*¹⁰⁵

Seorang wali tidak boleh menikahkan gadis yatim yang berada di bawah perwaliannya sebelum meminta persetujuan kepada gadis yatim tersebut terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari sebuah hadist yang berarti : *“Gadis Yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.”* (HR Ahmad)¹⁰⁶

Dalam redaksi hadits lain dijelaskan, *“Tidak ada hak apapun bagi wali terhadap janda dan perempuan yatim harus diajak bicara.”*¹⁰⁷

Keharusan meminta izin terhadap perempuan dalam pernikahan menandai bahwa perempuan dapat menolak khitbah jika ia tidak berkenan dengan laki-laki yang mengkhitbahnya.

Namun, dalam penolakan tersebut harus dengan tata cara yang halus dan lembut tanpa menyinggung perasaan si pelamar tapi intinya tetaplah

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibn Rusyd, *Op. Cit*, h., 401.

¹⁰⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Loc. Cit*, Kitab Nikah No. 839.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak lamaran, hal tersebut agar tidak menimbulkan fitnah dalam Islam dan tidak menyakiti hati orang lain. Karena seperti yang kita tahu, hukum menyakiti orang dalam Islam adalah dilarang dan dapat menimbulkan dosa.

3.3 Al-'Urf

3.3.1 Pengertian Al-'Urf

Kata *al-'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف يرف), sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan "arti sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".¹⁰⁸ Kata *al-'urf* juga terdapat dalam Al-quran dengan arti "*ma'aruf*" (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf (7): 199¹⁰⁹

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".¹¹⁰

Adapun dari segi terminology, kata *al-'urf* mengandung makna:

¹⁰⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h., 153. Lihat juga : Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h., 333.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2009), h., 387.

¹¹⁰ Q.S Al-A'raf [7] : 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا عَتَدَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفِظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلُفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”

Kata *al-’urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-’adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَفَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

Kata *al-’adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹¹¹ *Al-’urf* itu sendiri bukanlah dalil syar’i yang berdiri sendiri, tetapi lebih ke arah *masalah mursalah*.¹¹²

Kata *al-’adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

¹¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h., 209.

¹¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h., 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al- 'urf* atau *al- 'adah* terdiri atas dua bentuk yaitu *al- 'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al- 'urf al-fi 'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

Hanya saja terdapat perbedaan antara adat dan *al- 'urf* jika dilihat dari segi kandungannya. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tanpa melihat baik buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan *al- 'urf* mengandung konotasi baik seperti yang tampak pada kata *ma'aruf* dalam surah al-A'raf (7): 199 tersebut.¹¹³

3.3.2 Dalil Kehujjahan Al- 'Urf

Adapun kehujjahan *al- 'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argument-argumen berikut ini.

- a. Firman Allah pada surah al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'aruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹¹⁴

Melalui ayat di atas Allah memerintah kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'aruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'aruf* itu sendiri

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

¹¹⁴ Q.S Al-A'raf [7] : 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah berfirman pada surah Al-Ma'idah (5): 6;

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempunakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”¹¹⁵

3.3.3 Pendapat Ulama Tentang ‘Al-’Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-’urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil *syara’*. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-’urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah.¹¹⁶

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *al-’urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *al-’urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*.

Menurut ulama Hanafiyyah *al-’urf* digunakan untuk men-*takhsis* umum *nash*. Umpamanya dalam ayat Al-quran dijelaskan bahwa masa menyusukan anak yang sempurna ialah dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau *al-’urf*

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h., 212-213

¹¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit*, h., 212.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini digunakan untuk men-*takhsis* umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anaknya selama dua tahun penuh.

Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-*takhsisnash* yang umum itu hanyalah *al- 'urf qauli*¹¹⁷ bukan *al- 'urf fi 'li*.¹¹⁸

Al- 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat sehingga hukum juga berubah mengikuti perubahan tersebut. Hal ini untuk mengukuhkan prinsip kemudahan dalam syariat Islam yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shalih likull zaman wa makan*).¹¹⁹

Para ulama yang mengamalkan *al- 'urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *al- 'urf* tersebut, yaitu:

- a. Adat atau *al- 'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syariat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *al- 'urf* yang

¹¹⁷ *al- 'urf qauli*; yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Namun dalam keseharian, orang Arab menggunakan kata *walad* untuk anak laki-laki saja, tidak untuk anak perempuan. Lihat : Amir Syarifuddin, op. Cit, hlm. 388.

¹¹⁸ *al- 'urf fi 'li*; yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya dalam jual beli tanpa menggunakan akad terlebih dahulu. Lihat : *Ibid*.

¹¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit*, hlm 215.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian juga dengan kebiasaan mamakan ulat.

- b. Adat atau *al-'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan “adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: “*Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*”
- c. *Al-'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *al-'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *al-'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *al-'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan: “*Al-'urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan datang kemudian.*”

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹²⁰

3.4 Masalah Mursalah

3.4.1 Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat. Diterima akal sehat berarti akal tersebut mengetahui dengan pasti kenapa sesuatu itu seperti itu. Setiap perintah Allah SWT dapat diketahui dan dipahami oleh akal karena setiap perintah Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan alasannya oleh Allah SWT maupun tidak.¹²¹

Maslahah Mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *masalahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* yang berarti lepas. Menurut istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia lepas dari dalil secara khusus.¹²²

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 400-402.

¹²¹ Mardani, *Op. Cit*, h., 334.

¹²² Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit*, h., 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah ini sendiri juga tertuang dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah [2] ayat 220 yang berbunyi :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²³

Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita untuk selalu melakukan hal yang mendatangkan manfaat, kebaikan dan bermuara adanya perbaikan di

¹²³ Q.S Al-Baqarah [2] : 220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka bumi ini. Sebaliknya, dalam ayat ini, Allah swt melarang manusia untuk melakukan perbuatan buruk serta melakukan perusakan. Ayat ini juga menyiratkan bahwa perbuatan baik tidak hanya dilakukan kepada alam, namun juga kepada sesama manusia khususnya dalam lingkup sosialnya.

Dalam tujuan *syari'at* terkandung makna memelihara dan mengembangkan kehidupan keberagamaan rakyat (*hifzh ad-din*); memelihara dan mengembangkan nilai-nilai spiritual dan kehormatan rakyat (*hifzh an-nafs*); memelihara dan mengembangkan kecerdasan rakyat (*hifzh al-'aql*); memelihara dan mengembangkan kehidupan keluarga (*hifzh an-nasl*); serta memelihara dan mengembangkan perekonomian rakyat (*hifzh al-mal*).¹²⁴

3.4.2 Syarat-syarat Masalah Mursalah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang juga dipakai oleh jumhur ulama menyatakan, suatu *masalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

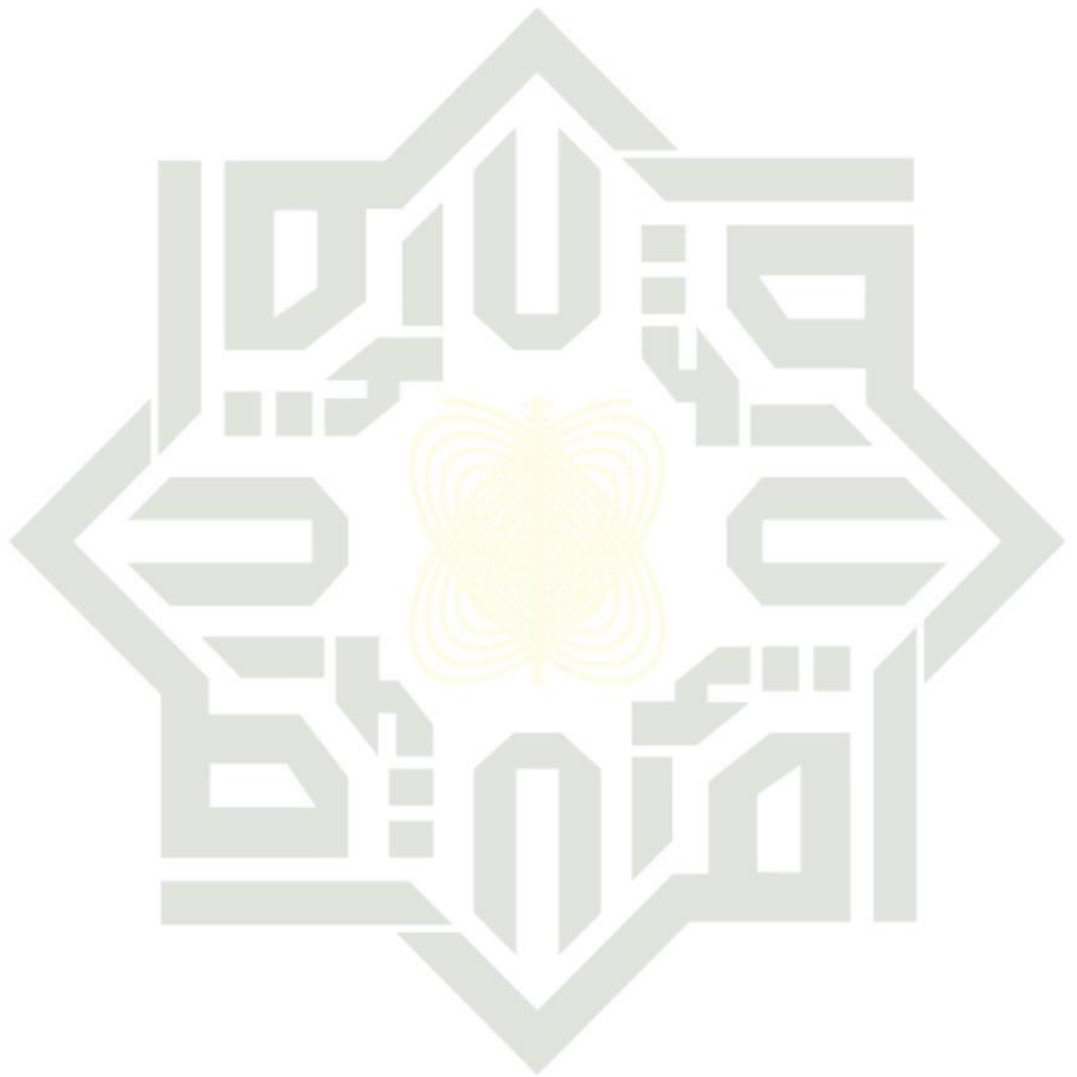
1. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

¹²⁴ Cik Hasan Basri, *Metode Penelitian Fiqh*, Edisi I, Cet. I, (Bogor : Kencana, 2003), h., 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma'ulama/¹²⁵



UIN SUSKA RIAU

¹²⁵ Satria effendi, Op.cit, h., 148 dan 153. Lihat juga : ahsin W. algafudz, op,cit h., 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian akhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil berdasarkan kepada penelitian yang telah penulis lakukan. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa : “tidak ditemukan adanya pertentangan antara izin tertulis *niniak mamak* sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu dengan Hukum Islam. Secara spesifik, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut :

1. Mekanisme dari izin *niniak mamak* sebagai syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan yakni diawali dengan menghubungi *niniak mamak* ketika akan diadakan acara *babaluak*. Kemudian menemui *niniak mamak* penanggung jawab surat izin perkawinan untuk meminta surat izin serta tanda tangannya. Selanjutnya berturut-turut menemui Wali Jorong, Ketua KAN, Sekretaris KAN dan Penasihat Perkawinan.
2. Izin *niniak mamak* dalam perkawinan berfungsi sebagai penunjang rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam agar syarat dan rukun perkawinan dapat terpenuhi dan tujuan perkawinan dapat tercapai, bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengganti Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Saran

Berdasarkan pengkajian dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi Peraturan terkait dengan izin *niniak mamak* dalam perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa masih banyak masyarakat di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang merasa kesulitan untuk menemui *niniak mamak* dan perangkat Nagari dalam rangka meminta izin untuk menikah. Untuk itu, penulis ingin memberikan saran agar jumlah *niniak mamak* yang perlu dimintai tanda tangannya dikurangi. Dalam hal ini meneliti berpendapat bahwa *niniak mamak* yang dimintai tanda tangannya cukup salah seorang perwakilan persukuan dan ditambah dengan tanda tangan dari wali jorong setempat.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Adapun saran yang ingin penulis berikan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai izin tertulis *niniak mamak* dalam Perkawinan ini adalah :

1. Agar peneliti selanjutnya dapat mencari bahan referensi dari buku, jurnal maupun karya ilmiah lain sebanyak-banyaknya yang terkait dengan izin tertulis *niniak mamak* dalam perkawinan ini sehingga hasil penelitian dan karya tulis yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Agar peneliti selanjutnya dapat mencari data-data di lapangan baik yang tertulis maupun melalui wawancara dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi sehingga hasil yang dapat ditemukan kemudian dapat menjadi lebih lengkap lagi.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abd. Rahman Dahlan. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Wahhab Khallaf. 2012. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Asy-Syurbasi. 2013. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*. terj. Cet. 7. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Tholabi Karlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahsin W. Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Ali Yusuf as-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga*. terj. cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana.
- Amran Ys Chaniago. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andi Tahir Hamid. 2005. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia.
- Cik Hasan Basri. 2003. *Metode Penelitian Fiqh*. Edisi I. Cet. I. Bogor : Kencana.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jil. 2. Terj. Jakarta: Pustaka Amani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kamal Mukhtar. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Edisi I. Cet. I. Jakarta : Kencana.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. 2013. Edisi I. Cet. I. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad Amin Suma. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Fu'ad Adbu Baqi. 1414 H. *al-Lu'lu' wal Marjan (Koleksi Hadits Yang Disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)*. Semarang : al-Ridha.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. terj. Jil. 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani. 2006. *Shahih Sunan an-Nasa'i*. terj. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Abdul Djamali. 2000. *Hukum Islam*. Bandung : Mandar Maju.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudiro. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*. . cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Slamet Abidin. dkk. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet. 1. Terj. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulaiman Rasjid. 2012. *Fiqh Islam*. cet: 56. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers.

B. JURNAL

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yudisia. Vol. 5. No. 2.

Damsar dan Indrayani. *Konstruksi Sosial Budaya Minangkabau Atas Pasar*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2016 Vol. 18 No. 1

Format dan Laporan Profil Desa/Kelurahan Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Bulan Desember Tahun 2017

Lia Saftri, Ichsan Malik, Josephine R. Marietta. *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara April 2018. Volume 8 Nomor 1

Marwin. 2014. *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*. Jurnal ASAS. Vol. 6. No. 2.

Merisa Asrina. 2018. *Kajian Karakter Lanskap Minangkabau Berdasarkan Karya Sastra Tambo Minangkabau*. Bogor: Institute Pertanian Bogor.

Moh. Mahmud dan Bahtiar Agus Pribadi. 2016. *Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1. Nomor 1.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Sinayan Tahun 2014-2020

Rachmadi Usman. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal : Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03

Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal : Yudisia. Vol. 7. No. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Perbandingan Sumber Hukum Islam*. Jurnal : TAHKIM. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1.

Siti Faizah. 2014. *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Sirri*. Isti'dal: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No.1.

Siti Teny Nurfalidah. *Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan yang Diakibatkan Kehamilan*. Jurnal: Prosiding Peradilan Agama Vol. 4. No. 8

Trusto Subekti. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Wahyu Wibisana. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 14. No. 2.

C. INTERNET

<https://amcnews.co.id/2018/08/15/pakan-sinayan-nagari-berprestasi-terbaik-i-2018-di-sumbar/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Zhahiri

<https://rumaysho.com/2988-kaedah-fikih-5-kesulitan-mendatangkan-kemudahan.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ngarai>

https://min.wikipedia.org/wiki/Banuhampu,_Agam

https://id.wikipedia.org/wiki/Luhak_Agam

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUTHIA RAHMATUL HUSNA
 NIM : 11521201591
 Jurusan : Hukum Keluarga (AH)
 Judul : Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam
 Pembimbing : Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 1 Oktober 2019

Pimpinan Redaksi




M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL
 NIP. 1988 0403 2019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Subrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. <http://fasih.uin-suska.ac.id> E-mail : fasih@uin-suska.ac.id

DAFTAR PERTANYAAN ANGKET

Judul Penelitian : Izin Tertulis *Niniak Mamak* Sebagai Syarat Pencatatan Perkawinan Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Nama :

Persukuan :

No.	PERTANYAAN	YA	KADANG	TIDAK
	Apakah ketika saudara menikah, saudara meminta izin tertulis dari <i>Niniak Mamak</i> di persukuan saudara?			
	Pentingkah adanya izin tertulis <i>Niniak Mamak</i> dalam perkawinan ini?			
	Adakah kendala yang saudara rasakan dalam proses meminta izin kepada <i>Niniak Mamak</i> ?			
	Apakah peraturan ini merepotkan bagi masyarakat yang ingin mengurus perkawinan?			
	Apakah <i>Niniak Mamak</i> saudara mudah untuk ditemui?			
	Apakah <i>Niniak Mamak</i> saudara sulit untuk ditemui?			
	Bolehkah seorang <i>anak kemenakan</i> menikah tanpa adanya izin dari <i>Niniak Mamak</i> ?			
	Adakah kejadian mengenai perkawinan tanpa izin <i>Niniak Mamak</i> yang saudara ketahui?			
	Adakah manfaat yang saudara rasakan dari adanya izin tertulis dari <i>Niniak Mamak</i> ini?			
	Apakah saudara setuju dengan adanya peraturan ini?			
	Apakah saudara setuju jika peraturan ini dihapuskan?			
	Apakah peraturan ini bertentangan dengan Hukum Perkawinan Indonesia?			
	Apakah peraturan ini bertentangan dengan Hukum Islam?			

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Mengenai Izin Tertulis *Niniak Mamak* Dalam Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan

A. Untuk *Niniak Mamak*

1. Sejak kapan adanya peraturan mengenai izin tertulis *Niniak Mamak* dalam perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ini berlaku?
2. Mengapa harus ada izin tertulis *Niniak Mamak* dalam perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu?
3. Bagaimana jika perkawinan tersebut diadakan tanpa ada surat keterangan dari *Niniak Mamak*?
4. Adakah alasan bagi seorang *Niniak Mamak* untuk menentang suatu perkawinan?
5. Bagaimana jika ada *Niniak Mamak* yang sedang tidak ada di tempat seperti tinggal diperantauan?
6. Bagaimana jika ada *Niniak Mamak* yang bepergian untuk sementara waktu? Apakah *anak kemenakan* yang hendak mengurus surat tersebut harus menunggu?
7. Bagaimana mekanisme dari pemberian surat keterangan dari *Niniak Mamak* ini?
8. Apakah peraturan ini bertentangan dengan hukum Islam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Untuk Masyarakat yang Sudah Menikah

1. Bagaimana mekanisme pemberian surat keterangan dari *Niniak Mamak* ketika akan mendaftarkan perkawinan?
2. Apakah ada kendala yang dirasakan ketika ingin menemui *Niniak Mamak* dalam hal meminta surat keterangan dan tanda tangan *Niniak Mamak* tersebut?
3. Bagaimana menurut pendapat saudara jika perkawinan yang akan dilangsungkan tidak didahului dengan permintaan izin kepada *Niniak Mamak*?
4. Adakah manfaat yang saudara peroleh dari adanya peraturan ini?
5. Apakah peraturan ini bertentangan dengan hukum Islam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUSAKO KEBESARAN DATUAK SATI PASUKUAN SIMABUA KANDANG PAKAN SINAYAN "SURAT IZIN MENIKAH"

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Dt Atau yang mewakili dengan ini memberi izin anak kemenakan kami untuk menikah. Adapun biodata anak kemenakan kami yang memberi izin tersebut adalah sebagai calon(*) Suami-Istri.

Nama :	Jorong :
Tempat/tgl lahir :	Nagari :
Suku :	Kecamatan :
Pekerjaan :	Status Perkawinan :

Adalah anak kandung dari pernikahan seorang bapak :

Nama/gelar :	Jorong :
Tgl.lahir/umur :	Nagari :
Suku :	Kecamatan :
Pekerjaan :	Status perkawinan :

Dengan seorang ibu :

Nama/gelar :	Jorong :
Tgl.lahir/umur :	Nagari :
Suku :	Kecamatan :
Pekerjaan :	Status perkawinan :

Dan biodata calon suami/istri dan anak kemenakan kami tersebut di atas :

Nama :	Jorong :
Tempat/tgl lahir :	Nagari :
Suku :	Kecamatan :
Pekerjaan :	Status perkawinan :

Adalah anak kandung dari pernikahan seorang bapak :

Nama/gelar :	Jorong :
Tgl.lahir/umur :	Nagari :
Suku :	Kecamatan :
Pekerjaan :	Status perkawinan :

Dengan seorang ibu :

Nama/gelar :	Jorong :
Tgl.lahir/umur :	Nagari :
Suku :	Kecamatan :
Pekerjaan :	Status perkawinan :

Menurut setahu kami selaku Mamak Pemberi Izin tidak ada bertentangan dengan Hukum Syari'ah, Hukum Adat, begitu juga dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Bilamana di kemudian hari Surat Izin menikah yang kami berikan kepada anak kemenakan kami tersebut di atas tidak benar/palsu, kami bersedia dituntut di pengadilan dengan tidak melibatkan Wali Nagari dan Badan Penasehat Perkawinan Kenagarian Pakan Sinayan.

Demikianlah Surat Izin ini kami berikan dan untuk selanjutnya kami serahkan atas pertimbangan Badan Penasehat Perkawinan Kenagarian Pakan Sinayan.

Pakan Sinayan, 20...

Mengetahui,
Kepala Jorong.....

Yang memberi izin,

(.....)

(Imal Dt. Sati)

Mengetahui Badan Penasehat Perkawinan

(KETUA KAW.....)

(SEKRETARIS KAW.....)

(PENASEHAT PERKAWINAN.....)

- Coret yang tidak perlu
- Bagi Ninik Mamaknya masih hidup dan berada di kampung, strip yang ruangan mewakili

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **"IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"** yang ditulis oleh :

Nama : MUTHIA RAHMATUL HUSNA
NIM : 11521201591
Program Studi: HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 27 September 2019

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji 1
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 2
Ade Fariz Fakhrollah, M. Ag

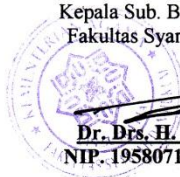

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. http://fasih.uin-suska.ac.id, E-mail : fsiuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/184/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.07 Januari 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUTHIA RAHMATUL HUSNA
NIM : 11521201591
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Izin
Tertulis Ninik Mamak sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan
Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau Menurut Hukum Islma

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


Hajar, M.A.
1980712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/17035
T E N T A N G



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/184/2019 Tanggal 7 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

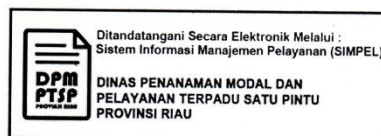
- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : MUTHIA RAHMATUL HUSNA |
| 2. NIM / KTP | : 11521201591 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI
PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN
KECAMATAN BANUHAMPU DINJAU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN
AGAM SUMATERA BARAT |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Januari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat

Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 62 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2019

Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/17035 tanggal 7 Januari 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : MUTHIA RAHMATUL HUSNA
Tempat/Tanggal lahir : Padang Luar / 25 Juli 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Lapau Pajak Jorong Tobo Ladang Nagari Pakan Sinayan
Nomor Kartu Identitas : 1306066507970002
Judul : Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau Menurut Hukum Islam
Lokasi Penelitian : Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu
Jadwal penelitian : 7 Januari - 7 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian, agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Januari 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DPMP & PTSP
MASWAR DEDI, AP, MSI
NIP. 19740618 199311 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN BANUHAMPU

Jalan Raya Sungai Buluah Km. 5 Cingkariang Telp/Fax (0752) 7839367
Kode Pos 26181

IZIN PENELITIAN

Nomor : 2 /PNL/BNH-2019

Setelah mempelajari surat dari Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/184/2019, tanggal 7 Januari 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian dan Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor: B.070/62-Periz/DPM&PTSP/II/2019 tanggal 16 Januari 2019. Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/riset/penelitian/observasi/data awal Penelitian Lapangan di Kecamatan Banuhampu yang dilakukan oleh:

Nama	: MUTHIA RAHMATUL HUSNA
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Luar, 25-07-1997
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Lapau Pajak Jorong Tobo Ladang, Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
Nomor Kartu Identitas	: 1306066507970002
Lokasi Penelitian	: Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Waktu Penelitian	: 7 Januari s/d 7 April 2019
Anggota	: -
Judul Skripsi	: Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau Menurut Hukum Islam Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.p. Camat yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian ini dicabut.

Ditetapkan di : Sungai Buluah
Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT BANUHAMPU

Afdhal S. Sos
NIP.19621213 198602 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU
NAGARI PAKAN SINAYAN**

Jln.Raya Padang Lua – Maninjau Km.3

SURAT REKOMENDASI

No : 471/ 01 /WN-PS/2019

Sesuai dengan surat Kecamatan Banuhampu, tentang Izin Penelitian Nomor : 2/PNL/BNH-2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan ini memberi rekomendasi atas Penelitian Lapangan yang dilakukan oleh :

Nama	: MUTHIA RAHMATUL HUSNA
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Luar , 25-07-1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Lapau Pajak, Tobo Ladang Nag.Pakan Sinayan
Waktu Penelitian	: 07 Januari s/d 07 April 2019
Judul Skripsi	: Izin Tertulis Niniak Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kab.Agam

Demikianlah Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pakan Sinayan, 29 Januari 2019M

23 Jumadil Awal 1440H

Wali Nagari Pakan Sinayan



H.HS.DT.KAYO NAN KUNIANG,S.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU
NAGARI PAKAN SINAYAN**

Jln.Raya Padang Lua – Maninjau Km.3

SURAT KETERANGAN

No : 471/ 07 /WN-PS/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dengan ini menerangkan bahwa :

NO	N A M A	NIM
1	MUTHIA RAHMATUL HUSNA	11521201591

Bahwa sesuai dengan surat permohonan izin observasi atas nama mahasiswa tersebut diatas, maka pada hari ini mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan observasi lapangan dengan judul proposal “ Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat.

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

Pakan Sinayan, 13-08-2019 M
12 Zulhijjah 1440H



Wali Nagari

[Signature]

HS.BT KAYO NAN KUNANG S.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muthia Rahmatul Husna, lahir di Padang Luar Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tanggal 25 Juli 1997 merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Ermi Yenti. Penulis menyelesaikan sekolah Dasar di SDN 08 Pakan Sinayan pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Banuhampu dan lulus pada tahun 2012 lalu melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Banuhampu dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam"** di bawah bimbingan langsung Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 26 September 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU